

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau pun sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah ini digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun penguasaannya ada pada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Di bidang pertambangan, penguasaan tersebut ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan penguasaan sendiri ataupun melimpahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan.

Hingga pada tahun 2009 terbentuklah peraturan baru mengenai pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba mulai diperkenalkan sistem baru dalam usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian Kontrak Karya bagi investor yang mengajukan izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan sistem ini diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar kepentingan investor dan pihak lain dapat dilindungi.

Kata kunci: Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Perlindungan Hukum

ABSTRAC

Indonesia, a country which is rich for resources, both of human and natural resources. These abundant natural resources use for Indonesian's prosperity and the authority is under government as it arranged in article 33 subsection 3 UUD 1945 "earth, and water and resources that contains on it controlled over by government and used to increase citizen's prosperity". In mining, the authority is under the country and government as the representative. Government carries out the authority independently whether delegate it to other for the management. There has been a lot of changes on mining tenure arrangements, from contract to permit. In required setting clearer that the interests of investor and other parties can be protected.

Keywords: Mining, Production Business License of Product Operation, Legal Protection